



Komunikasi Politik dalam Dakwah Nabi Muhammad Saw. kepada Raja Najasyi

Karunia Safitri

STID Al-Hadid, Surabaya

karuniasafitri17@gmail.com

Abstrak: Kedudukan politik dan dakwah sering kali dipisahkan. Padahal, dalam dakwah diperkenankan adanya langkah politik untuk mencapai tujuan dakwahnya, salah satunya dijematani melalui dakwah struktural. Nabi Muhammad Saw sebagai Rasulallah dalam berbagai peristiwa sejarah telah terbukti menggunakan pendekatan politik dalam dakwah, salah satunya pada peristiwa pengiriman surat kepada Raja Najasyi Habasyah. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi komunikasi politik dalam dakwah Nabi Muhammad Saw kepada Raja Najasyi. Dipilihnya surat Nabi Muhammad Saw kepada raja Najasyi disebabkan karena peristiwa ini adalah salah satu proses dakwah nabi yang berhasil kepada pemuka agama yang besar pada masa itu. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan sumber data dokumentasi berupa literatur sejarah. Hasil dari penelitian ini adalah nabi Muhammad menggunakan komunikasi politik dakwah yang diindikasikan melalui psikologi komunikator, konteks, komunikan, dan dampak politik. Temuan selainnya adalah pada komunikasi politik dalam dakwah khususnya dalam dakwah Nabi Muhammad Saw diorientasikan untuk tujuan dakwah semata, nabi juga menerapkan etika Islam yang juga etika universal sehingga mencapai manfaat dalam dakwah maupun diplomatik, dan menggunakan sportif alih-alih segala cara dalam mencapai tujuannya.

Kata kunci: politik, dakwah politik, dakwah struktural, komunikasi politik,

Abstract: Political Communication in the Da'wah of the Prophet Muhammad to King Najasyi. Da'wa and politic frequently known as two different knowledge field. Therefore, da'wa and politic are interdiscipline knowledge; which is need more than one knowledge to be understanding. Da'wa and politic could be understanding as one of da'wa method, structural da'wa. Muhammad (PBUH) as Rasulallah and proselyzer Islam founded using political communication method in his da'wa, one of them is his correspondence to Negus or Najashi, King of Habasyah. Communication of Muhammad (PBUH) with Negus is one of the best and successfull correspondence, so neccessary and has interesting variable tobe research. The history of correspondence could be called political communication of da'wa. This research aim's to identified of political communication at da'wa Muhammad (PBUH) to Najashi. This research based on qualitative and descriptive method. This research found result that da'wa or preaching Muhammad (PBUH) to Najashi based on political communication which is identified on communicator, pyschology of communication, context, political effect, and object of communication (Najashi). Another finding in this research is, Muhammad (PBUH) using ethics in his communication, sportsmanship politics Islam which is universal etics, so at the end of communication achieves benefits of both participants.

Keywords: preaching, politics, political preaching, structural preaching, political communication



Pendahuluan

Dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk menyeru, menyebarkan, mengajak seseorang agar memahami hingga menjalankan ajaran Islam, tidak bisa ditampik bahwa dakwah memerlukan komunikasi. Bahkan dapat dikatakan bahwa dakwah adalah perilaku sebagaimana proses komunikasi pada umumnya.¹ Pada komunikasi, pengirim pesan disebut sebagai komunikator sedangkan dalam dakwah dikenal istilah dai. Penerima pesan disebut sebagai komunikan, dan dalam dakwah dikenal sebagai mad'u.²

Perbedaan substansial antara dakwah dengan komunikasi adalah mulai dari psikologis komunikator (dalam hal ini dai) yang memang menginginkan dan berkehendak untuk menyampaikan pesan dakwah. Kemudian tujuan yang hendak diraih oleh dai adalah agar komunikan atau mad'u menerima ajaran Islam yang disampaikan bahkan menjalankannya secara sukarela, tanpa adanya paksaan. Pun dalam proses dakwah yang dijalankan tidak hanya sekedar mentransmisikan pesan, melainkan dilandaskan pada proses komunikasi yang *bil hikmah* sehingga pesan bisa diterima dengan baik.³

Metode dalam dakwah itu sendiri terdapat setidaknya tiga pendekatan, yakni dakwah

melalui lisan (*bil lisan*), dakwah melalui tulisan (*bil qalam*), dan dakwah melalui perilaku (*bil hal*).⁴ Menariknya, masing-masing metode dakwah tersebut dapat dilakukan dengan mengikuti perkembangan zaman. Sebagai contoh, pada era Nabi Muhammad Saw media tulis adalah melalui pelepah kurma, sedangkan sekarang selain ada teknologi kertas ada pula teknologi *website* dan media tulis lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa dakwah *bil qalam* dapat dilaksanakan mengikuti perkembangan zaman tanpa mengurangi substansi dari dakwah itu sendiri.⁵

Mengingat kedudukan manusia tidak hanya sebagai seorang individu tetapi juga seorang hamba, warga negara, dan bagian dari masyarakat, maka dalam menjalankan aktivitas dakwah tersebut idealnya juga memperhatikan dan mempertimbangkan aspek-aspek selain aspek dakwah. Bila menelisik aspek berbangsa dan bernegara yang mana mengatur kehidupan seluruh warga negara dan orang-orang yang tinggal di dalamnya, maka diperlukannya suatu sistem agar kehidupan bernegara tersebut dapat terlaksana dengan baik. Sistem tersebut setidaknya terdiri atas pihak yang memimpin massa, kelompok yang dipimpin, kelompok yang mengurus birokrasi, dan kelompok yang menyuarakan sekaligus mempengaruhi penguasa agar kebijakan bisa menyesuaikan bahkan berpihak pada orang banyak atau orang

¹ Fatiha Ardi Hatta dan Dhifa Widya Nur Arifah, "Pesan Dakwah dalam Film Animasi Hafiz & Hafizah Pendekatan Struktur Narasi Todorov," *Bil Hikmah: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 2, no. 1 (30 Januari 2024): 127–50, <https://doi.org/10.55372/bilhikmahjkpi.v2i1.26>.

² Wahyu Ilaihi dan Andriyani Kamsyah, *Komunikasi dakwah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010).

³ Agung Teguh Prianto, "Komunikasi Dakwah Berbasis Multikultural dalam Perspektif Al-Qur'an," *Bil Hikmah:*

Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam 1, no. 1 (22 Juli 2023): 199, <https://doi.org/10.55372/bilhikmahjkpi.v1i1.15>.

⁴ H. Moh Ali Aziz, *Ilmu Dakwah* (Jakarta: Kencana, 2004).

⁵ Yudi Asmara Harianto, "Prospek Dakwah Bil Qalam di Era New Media," *Bil Hikmah: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 2, no. 1 (30 Januari 2024): 151–68, <https://doi.org/10.55372/bilhikmahjkpi.v2i1.27>.

yang dipimpin sehingga menciptakan keseimbangan dalam kehidupan bersama tersebut. Sistem inilah yang disebut dengan sistem politik.⁶ Sistem politik ini ada pada tiap negara yang berdaulat. Karena tiap manusia, utamanya umat Islam adalah juga bagian dari negara, maka kehidupan umat Islam sejatinya akan melekat dan dipengaruhi dengan sistem politik.

Pada perspektif lain menurut Ramlan Subakti, ketika seorang dai, ulama, maupun pemuka agama selainnya dalam mempengaruhi jemaahnya menggunakan cara berpikir jemaahnya sehingga tidak menggunakan basis agama, perilaku tersebut sudah dikatakan sebagai kegiatan politik untuk keperluan dakwah.⁷ Salah satu bukti bahwa Islam tidak hanya sebatas agama melainkan juga perwujudan dan fasilitator kedudukan manusia sebagai hamba dan bagian dari negara adalah pada masa dakwah Nabi Muhammad Saw di Madinah, masjid digunakan sebagai tempat untuk membicarakan siasat perang, setra umat muslim di Madinah, tempat penyambutan delegasi asing, dan aktivitas selainnya selain aktivitas ibadah.⁸

Sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, manusia terikat dengan multidimensinya peran dan kedudukannya dalam masyarakat. Ia tidak hanya sebagai seorang warga negara dan anggota masyarakat, melainkan juga seorang hamba. Ada kalanya dalam menjalankan satu perilaku yang ditujukan untuk

dakwah, akan beriringan juga dampak perilaku tersebut terhadap unsur politik, yang membuat perilaku tersebut tidak hanya dianggap sebagai realitas dakwah, melainkan juga realitas politik. Salah satu contohnya adalah pengiriman surat Nabi Muhammad Saw kepada raja-raja di semenanjung Arab. Sebelum adanya perjanjian Hudaibiyah, umat Islam kesulitan untuk melakukan komunikasi dengan umat selainnya, sebab boikot yang diperintahkan kaum Quraisy. Hal ini dibuktikan dengan umat Islam terisolasi dengan kaum selainnya, diusir bahkan ada yang disiksa, tidak bisa melakukan perdagangan, dan masih banyak lagi. Akhirnya, kaum muslimin melakukan hijrah ke Madinah.^{9 10}

Setelah dua tahun di Madinah, ditambah datangnya bulan Haram (bulan dilarangnya berperang), Nabi Muhammad Saw dan kaum muslimin ingin melaksanakan ibadah haji ke Mekkah. Akan tetapi, kedatangan umat muslim yang semata-mata ingin beribadah haji, dianggap kaum Quraisy sebagai upaya untuk berperang, sekalipun umat muslim sudah berihram dan hanya membawa pisau kecil untuk berkorban.¹¹

Setelah melalui beberapa kali proses komunikasi antara kedua belah pihak, umat muslim dan kaum Quraisy menyepakati sebuah perjanjian di antara kedua belah pihak yang dikenal sebagai perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian tersebut memiliki beberapa butir pasal, yang salah satunya

⁶ Ramlan A. Subakti, *Memahami ilmu politik* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), 8.

⁷ Subakti, *Memahami ilmu politik*.

⁸ Husayn Haikal, *Rasulullah dan Al-Khulafa'ur Rasyidun* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2008).

⁹ Haikal.

¹⁰ Ibnu Ishaq dan H. Samson Rahman, *Sirah Nabawiyah: sejarah lengkap kehidupan Rasulullah S.A.W* (Jakarta: Akbarmedia, 2013).

¹¹ Haikal, *Rasulullah dan Al-Khulafa'ur Rasyidun*.

adalah poin yang diajukan oleh Nabi Muhammad Saw agar umat muslim dipersilahkan untuk bersekutu dengan siapa pun.¹² Poin tersebut lantas dioptimalkan oleh Rasulullah SAW. Hal ini dibuktikan dengan pasca terjadinya perjanjian Hudaibiyah, Nabi Muhammad Saw mengirimkan surat-surat ke beberapa raja di semenanjung Arab. Pengiriman surat tersebut ditujukan untuk berdakwah ajaran Islam; diantaranya diberikan kepada raja Heraklius, Kisra, dan Najasyi.¹³

Pada saat pengiriman surat tersebut dilakukan, semenanjung Arab dipimpin oleh dua kerajaan besar yakni Romawi dan Persia. Romawi dipimpin oleh kaisar Heraklius sedangkan Persia dipimpin oleh Kisra.¹⁴ Najasyi adalah raja daripada Habasyah. Posisi Habasyah pada saat itu adalah sebagai oposisi dari kedua imperium besar pada saat itu. Hal yang sama juga terjadi pada umat muslim yang menjadi oposisi di antara Persia dan Romawi. Pada saat dakwah nabi, terutama pada masa perjanjian Hudaibiyah dilakukan, baik Mekkah maupun Madinah belum menjadi sebuah negara yang memiliki konstitusi, pemerintahan, dan pengakuan dari negara lain sebagaimana konsep negara yang dipahami dewasa ini. Akan tetapi hal tersebut tidak bisa lantas disimpulkan bahwa bukan berarti Madinah tidak bisa disebut sebagai sistem negara, tidak adanya sistem politik yang mempengaruhi dan dijalankan dalam pengelolaan negara tersebut. Secara pengaruh maupun kedudukan, Mekkah ataupun Madinah bukan bagian dari negara lain ataupun persemakmuran

negara lain. Akan tetapi, Mekkah merupakan pusat perdagangan yang cukup diperhatikan di semenanjung Arab pada saat itu, dengan Madinah yang merupakan salah satu kota yang juga diperhatikan dan memiliki pengaruh. Hal tersebut lantas dapat diasumsikan sebagai salah satu faktor geografis dalam politik. Pengaruh Muslim di Madinah dibuktikan dengan diangkatnya Nabi Muhammad Saw menjadi pemimpin pada saat itu, di saat wilayah Mekkah dan Madinah terpecah menjadi kabilah-kabilah.¹⁵

Pengiriman surat yang dilakukan nabi Muhammad kepada beberapa penguasa di semenanjung Arab, dapat diasumsikan sebagai pengiriman surat dari seorang pimpinan umat terhadap pimpinan selainnya. Pengiriman surat antar pemimpin tersebut, dapat diasumsikan melekat dengan faktor-faktor politik yang ada di antara kedua belah pihak. Konteks pengiriman surat Nabi Muhammad Saw kepada raja-raja, sulit untuk tidak dikatakan bahwa rasul tidak mempertimbangkan unsur politik yang melekat pada kedudukannya, dan kedudukan dari penguasa-penguasa terkait. Sebagai contoh, pengiriman surat nabi Muhammad kepada raja Heraklius. Beliau merupakan kaisar Romawi, sebuah negara adidaya yang ditakuti pada saat itu.

Pada saat pengiriman surat, Nabi Muhammad Saw memiliki posisi sebagai seorang pemimpin umat sekaligus seorang Rasulullah. Maka pengiriman surat beriringan antara kedudukan sebagai dai dan pemimpin. Dakwah terhadap penguasa, tentu berbeda dengan dakwah terhadap bukan penguasa. Konsep dakwah

¹² Haikal.

¹³ Haikal.

¹⁴ Haikal.

¹⁵ Haikal.

kepada penguasa dikenal sebagai dakwah struktural. Dakwah struktural memiliki kekhasan beriringannya perilaku dakwah dan politik, dengan mempertimbangkan aspek-aspek politik yang melekat pada saat proses dakwah dilakukan¹⁶. Maka pada dakwah struktural, kedudukan politik di antara kedua belah pihak dikatakan saling terikat unsur politik antara komunikator dan komunikan.

Islam merupakan sebuah agama yang tidak hanya memerintahkan hubungan antara manusia dengan Tuhan, melainkan juga mengajarkan tentang kepemimpinan, pemerintahan, dan kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa agama Islam juga mengajarkan mengenai sistem politik dalam ajarannya. Hal ini juga dibuktikan dengan beberapa ayat di Al-Quran yang membahas mengenai pemimpin dan sejenisnya, salah satunya pada Surah An-Nisa ayat 59: *“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”*.¹⁷

Relasi antara Islam dengan politik juga dikemukakan oleh Ramlan Subakti. Ketika

seorang pemuka agama (Islam menyebutnya sebagai dai) ketika mempengaruhi/berdakwah kepada jemaahnya berdasarkan cara berpikir jemaahnya sehingga tidak hanya berbasis agama, hal tersebut sudah bisa dikatakan sebagai kegiatan politik dalam dakwah.¹⁸

Perwujudan aktivitas politik dalam dakwah juga dibuktikan dengan digunakannya masjid sebagai sentra umat muslim di Madinah, tempat dibicarakan siasat perang, penyambutan delegasi dari kabilah atau negara asing, maupun aktivitas selainnya yang ditujukan untuk memperkuat umat Islam.¹⁹ Bila dikaitkan dengan konteks dakwah Nabi Muhammad Saw berupa pengiriman surat kepada raja-raja di semenanjung Arab khususnya kepada Raja Najasyi, sulit untuk menyatakan bahwa pengiriman surat tersebut tidak terikat dan tidak termasuk ke dalam komunikasi politik.

Pada realitas pengiriman surat Nabi Muhammad Saw kepada Raja Najasyi, tidak bisa dikesampingkan pula hubungan antara kedua belah pihak sebelum pada peristiwa tersebut. Raja Najasyi sebelumnya merupakan Abraha atau Abraham. Ia berkenan untuk menghancurkan Ka’bah pada masa kakek Nabi Muhammad Saw, Abdul Muthalib.²⁰ Maka memunculkan pertanyaan yang perlu dikaji lebih dalam, bagaimana proses dakwah dengan pendekatan komunikasi politik nabi Muhammad yang dilakukan kepada Raja Najasyi,

¹⁶ Muhammad Hildan Azizi, “Kesantunan Berbahasa Dakwah Struktural pada Debat Politik Para Nabi dalam Al-Qur’an,” *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 9, no. 1 (8 Februari 2023): 41–55, <https://doi.org/10.54471/dakwatuna.v9i1.2207>.

¹⁷ “Qur’an Kemenag,” a. 59, diakses 23 Juni 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=59&to=59>.

¹⁸ Surbakti, *Memahami ilmu politik*, 8.

¹⁹ Dr. A. Gaffar Aziz, *BERPOLITIK UNTUK AGAMA Missi Islam, Kristen, dan Yahudi tentang Politik*, trans. oleh Ilyas Siraj, SH.M.ag (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 136.

²⁰ Ibnu Ishaq dan H. Samson Rahman, *Sirah Nabawiyah*.

sehingga bisa mengubah hubungan antara Habasyah dengan Mekkah yang awalnya umat Islam di Mekkah yang diserang dan ingin ditaklukkan menjadi sebuah negara yang menerima umat muslim pada generasi selanjutnya. Selain itu, Al-Quran telah menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad Saw merupakan suri tauladan bagi umat Islam.

Kajian komunikasi politik sering kali dipelajari sebagai salah satu disiplin ilmu pada konteks non dakwah. Padahal, telah diketahui bersama bahwa ada kalanya dalam dakwah memerlukan atau bahkan terikat dengan komunikasi politik, khususnya untuk eksistensi dakwah itu sendiri. Peristiwa diplomasi nabi Muhammad dengan Najasyi telah banyak dibahas baik dari literatur barat maupun di Indonesia. Akan tetapi hal tersebut tidak dianggap sebagai suatu komunikasi politik dakwah, melainkan sebagai bentuk diplomasi semata. Belum banyak studi yang membahas mengenai komunikasi politik dakwah, melainkan sebagian besar membahas mengenai komunikasi dakwah, dakwah struktural, dan politik dakwah secara parsial. Studi terdahulu yang membahas kajian serupa adalah "Dakwah Politik Nabi Muhammad Kepada Raja Heraklius, Kisra Abrawaiz, Muqauqis, dan Najasyi" oleh Agusti Alfi Nurul Insani.²¹ Namun pada penelitian tersebut berfokus pada metode dakwah politik, tidak membahas komunikasi politik dalam dakwah, maupun tidak mendalami aspek yang melekat di antara Nabi Muhammad Saw dengan Raja Najasyi. Metode dakwah merupakan

rencana dan tahapan dalam dakwah secara umum, sedangkan penelitian kali ini membahas seputar komunikasi politik dalam dakwah Nabi Muhammad Saw.

Maka tujuan dari studi ini adalah sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang dakwah, khususnya di komunikasi politik dakwah. Literatur ini juga ingin mengkaji lebih dalam bahwasanya nabi telah melakukan komunikasi politik untuk tujuan dakwah, padahal ilmu pengetahuan terkaitnya baru ada lebih dari 10 abad sesudahnya. Sumber data dalam kajian ini adalah surat Nabi Muhammad Saw kepada raja Najasyi, data sejarah mengenai relasi antara Quraisy (suku nabi Muhammad), dengan Habasyah, serta konteks semenanjung Arab pada saat itu.

Berdasarkan karakteristik data dan sumber data, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Berdasarkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengurai komunikasi politik dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad Saw pada peristiwa pengiriman surat yang dilakukan kepada Najasyi untuk kemudian diambil substansi secara umum dari penelitian ini, maka teknik yang digunakan adalah deskripsi dengan melalui proses interpretasi terhadap peristiwa sejarah.²²

Komunikasi politik

Komunikasi merupakan kegiatan mengirim dan atau bertukar pesan antara satu orang dengan orang selainnya, baik secara lisan maupun tulisan. Sedangkan politik

²¹ Agusti Alfi Nurul Insani, "Dakwah Politik Nabi Muhammad Saw Melalui Surat Kepada Raja Heraklius, Kisra Abrawaiz, Muqauqis, Dan Najasyi,"

Islamic Communication Journal 4, no. 1 (7 Juli 2019): 60, <https://doi.org/10.21580/icj.2019.4.1.3595>.

²² Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011).

merupakan kegiatan membentuk, merebut, mempertahankan kekuasaan.²³ Maka, kegiatan mengirim dan menerima pesan yang ditujukan untuk merebut, membentuk, mempertahankan kekuasaan dapat dikatakan sebagai komunikasi politik.²⁴ selain itu, suatu bentuk komunikasi yang di dalamnya termuat unsur politik baik di aspek sistem sosial, komunikator, media, dan komunikasi juga dapat dikatakan sebagai komunikasi politik.²⁵ Pada penelitian kali ini, teori komunikasi politik yang menjadi pijakan adalah teori dari Dan Nimmo. Dipilihnya teori tersebut sebab teori komunikasi politik Dan Nimmo adalah kebaruan dari teori komunikasi politik Harold Lasswell.

Unsur dalam komunikasi politik sebagaimana pada komunikasi pada umumnya, hanya saja adanya tambahan unsur yang membedakan komunikasi biasa dengan komunikasi politik. Pertama, pada psikologi politik subjek atau komunikator yang melakukan komunikasi politik. Psikologi tersebut adalah terkait dengan dalam rangka apa, atau hendak meraih tujuan apa setelah terjadinya proses komunikasi. Hal ini merupakan dimensi psikologis komunikator.^{26;27} Untuk mengidentifikasi psikologi dari komunikator, maka digunakan pendekatan analisis perilaku pasca komunikasi/*feedback*

dan dampak komunikasi, terutama dampak politik.

Setidaknya ada dua dimensi psikologis dalam komunikasi politik, yakni subjek atau komunikator memang berkepentingan untuk melakukan komunikasi politik dan atau menghendaki dampak-dampak politik yang terjadi; dan subjek berkesadaran atas komunikasi dan atau dampak politik yang terjadi. Berkesadaran berarti subjek tidak menghendaki komunikasi politik atau dampak politik secara kekuasaan (sebagaimana yang dilakukan politikus), akan tetapi sadar bahwa komunikasi yang ia lakukan akan memberikan dampak secara politik.²⁸

Unsur kedua yang membedakan komunikasi politik dengan komunikasi pada umumnya adalah dampak politik.²⁹ Dampak politik dan atau dampak kekuasaan merupakan hasil akhir diraih pasca komunikasi tersebut dilaksanakan yang berkenaan dengan pengaruh maupun kekuasaan seseorang pasca proses komunikasi terjadi. Dampak tersebut terdiri atas dampak aktual maupun potensial, dan bisa berupa menguat atau melemahnya kekuasaan seseorang atau pihak tertentu terhadap pihak lain maupun masyarakat secara luas.

Unsur ketiga adalah pada komunikasi politik terikat dengan kedudukan atau

²³ Surbakti, *Memahami ilmu politik*.

²⁴ Dan Nimmo, *Komunikasi politik komunikator, pesan, dan media pengantar: Jalaluddin Rakhmat*, ed. oleh Jalaluddin Rakhmat (Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya, 1999).

²⁵ Jay G. Blumler, "Core Theories of Political Communication: Foundational and Freshly Minted," *Communication Theory* 25, no. 4 (1 November 2015): 426, <https://doi.org/10.1111/comt.12077>.

²⁶ William Seal Carpenter, "Politics: Who Gets What, When, How. By Harold D. Lasswell. (New York:

Whittlesey House. 1936. Pp. ix, 264.)," *American Political Science Review* 30, no. 6 (Desember 1936): 1174–76, <https://doi.org/10.2307/1948299>.

²⁷ Martha L. Cottam dkk., *Introduction to Political Psychology*, 4 ed. (New York: Routledge, 2022), <https://doi.org/10.4324/9780429244643>.

²⁸ Cottam dkk.

²⁹ Azizi, "Kesantunan Berbahasa Dakwah Struktural pada Debat Politik Para Nabi dalam Al-Qur'an."

pengaruh baik di aspek komunikasi maupun komunikator politik. Suatu proses komunikasi yang komunikatornya seorang pemimpin, baik komunikasi kepada sesama pemimpin maupun kepada bawahannya, tidak bisa lepas dari unsur politik dan kekuasaan yang dimiliki komunikator tersebut.³⁰ Sebagai contoh, seorang raja yang berkata kepada budaknya, tentu budaknya akan tunduk dan takluk sebab posisi pemimpin yang melekat pada komunikator membuat sang budak lantas menurutinya. Posisinya sebagai pemimpin itulah disebut sebagai sumber kuasa atau pengaruh politik, yang membuat komunikasi menerima proses komunikasi yang ada bahkan bergerak sebagaimana kehendak dari komunikator.

Keempat, konteks politik yang melingkupi proses komunikasi. Komunikasi yang terkait konteks atau situasi politik, lebih-lebih dilakukan oleh penguasa, politikus, atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap kekuasaan, sarat akan intensi politik.³¹ Seperti ketika seorang politikus yang berkomunikasi pada konteks pemilihan umum, tentu tidak bisa tidak lantas dikaitkan dengan situasi politik yang terjadi dan lebih-lebih untuk meraup suara dari rakyat.

Dakwah Struktural

Kegiatan dakwah dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yakni melalui dakwah kultural maupun struktural. Dakwah kultural merupakan perilaku mengajak, menyeru seseorang ataupun lebih untuk menerima, menyepakati, dan menjalankan ajaran Islam berdasarkan pertimbangan budaya, pemikiran, dan atau nilai-nilai tertentu.^{32,33} Dakwah struktural memerlukan tindakan perilaku politik spesifik pada komunikasi yang tetap mempertahankan nilai-nilai Islam.³⁴ Salah satu contoh pendekatan dakwah kultural di Indonesia adalah dakwah yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama yang seiring dengan budaya masyarakat Indonesia. Atau contoh lain, organisasi Muhammadiyah dengan kultur Islam berkemajuan sehingga dalam perkembangannya berlandaskan kultur kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dakwah yang berurusan dengan penguasa, bukan sekedar dakwah biasa. Selain karena adanya faktor pertimbangan bahasa, tutur kata, dan kesegaran karena kedudukan komunikasi sebagai penguasa, dakwah dengan penguasa tidak bisa ditampik bahwa adanya variabel-variabel politik yang melingkupi proses dakwah tersebut³⁵, dan berkaitan langsung dengan kedudukan seorang antara kedudukan sebagai dai dan kedudukan sebagai bagian dari negara.

³⁰ Azizi.

³¹ Nimmo, *Komunikasi politik komunikator, pesan, dan media pengantar*.

³² H Misbahuddin Amin, "DAKWAH KULTURAL MENURUT PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM," *Attadib Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (17 November 2020): 71–84, <https://doi.org/10.30863/attadib.v1i2.1023>.

³³ Azizi, "Kesantunan Berbahasa Dakwah Struktural pada Debat Politik Para Nabi dalam Al-Qur'an."

³⁴ H.Jazilul Fawaid, *BAHASA POLITIK AL-QUR'AN Konsep dan Aktualisasinya dalam sejarah*, ed. oleh Uinmuha Khusnan (Depok: Azza Media, 2012), 149.

³⁵ Azizi, "Kesantunan Berbahasa Dakwah Struktural pada Debat Politik Para Nabi dalam Al-Qur'an."

Surat Nabi Muhammad Saw. kepada Raja Najasyi

Nabi Muhammad Saw mengirimkan surat kepada raja Najasyi sebanyak dua kali. Surat pertama dikirimkan pada saat pasca perjanjian Hudaibiyah dilaksanakan. Surat kedua adalah pada saat Nabi Muhammad Saw memohon agar para muslimin di Habasyah dipulangkan ke Madinah. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian kali ini adalah surat kedua Nabi Muhammad Saw kepada Raja Najasyi yang dikirim pasca perjanjian Hudaibiyah dilaksanakan.

"Bismillaahirrahmaanirrahim. Dari Muhammad Rasulullah kepada Najasy Ashamah, penguasa Habasyah. Mudah-mudahan keselamatan atasmu. Sesungguhnya saya memuji Allah kepada-mu. Dialah Al-Malik, Al Quddus, As-Salam, Al-Mukmins, dan Al-Muhaimin.³⁶

Saya bersaksi bahwa Isa putera Maryam adalah ruh ciptaan Allah, dan kalimat-Nya yang disampaikan kepada Maryam, sang wanita suci, perawan dan ahli ibadah. Maka dia pun mengandung bayi Isa. Jadi, Allah menciptakan Isa dari ruh ciptaan-Nya, kemudian ruh itu ditiupkan kepadanya. Persis saat Dia menciptakan Adam dan meniupkan ruh padanya.

Ketahuiilah! Sesungguhnya saya mengajakmu untuk beribadah kepada Allah semata. Tada sekutu bagi-Nya. Saya juga mengajakmu untuk selalu loyal terhadap ketaatan kepada Allah. Karena itu, ikutilah saya dan berimanlah kepada agama yang saya bawa. Karena saya adalah utusan Allah.³⁷

Sekali lagi, saya mengajak kamu dan seluruh bala tentaramu untuk hanya beribadah kepada Allah. Saya telah menyampaikan hal ini dan sudah menasihatiimu. Terimalah nasihat ini dan salamku

(mudah-mudahan kesejahteraan) senantiasa atas orang yang mau mengikuti petunjuk."³⁸

Unsur Dakwah dan Politik Pada Saat Pengiriman Surat

1. Konteks Komunikasi Politik

Dalam analisis komunikasi politik, unsur utama yang perlu dianalisis adalah konteks. Konteks komunikasi politik perlu menjadi unit analisis sebab akan menjadi tolok ukur terkait dengan pengaruh efektivitas pesan, melihat strategi komunikasi yang dilakukan (sebab satu realitas komunikasi bisa dipahami dalam berbagai perspektif strategi komunikasi), serta untuk menganalisis dampak dari komunikasi politik yang dilakukan. Konteks yang melingkupi pesan politik, agar bisa teridentifikasi secara komprehensif perlu untuk dianalisis dari sebelum terjadinya proses komunikasi (pra), pada saat komunikasi dilakukan (pas), dan pada saat komunikasi selesai dilakukan (pasca).

Konteks pra perlu untuk dianalisis sebab konteks pra komunikasi dapat dikatakan sebagai stimulus awal, pendukung, pengiring, atau penyebab awal komunikasi politik dilakukan.

Konteks pas adalah hal-hal yang melingkupi baik secara langsung maupun tidak langsung pada saat komunikasi dilakukan. Hal-hal tidak langsung dapat dikatakan sebagai *bigger picture* proses komunikasi, sedangkan konteks langsung adalah lingkup makro dari proses komunikasi itu sendiri (utamanya terkait ruang dan waktu proses

³⁶ Uhaimid Muhammad Al-Uqaili dan Wafi Marzuqi Ammar, *Surat-surat Nabi kepada para raja dan panglima perang* (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011), 210.

³⁷ Al-Uqaili dan Ammar, 211.

³⁸ Al-Uqaili dan Ammar, 211.

komunikasi). Konteks pasca adalah hal-hal yang terjadi dan yang melingkupi pasca komunikasi politik dilakukan. Konteks pasca juga dapat dikatakan sebagai pembuktian bahwa komunikasi yang dilakukan memang komunikasi politik, berdasarkan pada dampak-dampak yang terjadi pasca komunikasi dilakukan. Dampak tersebut tentulah dampak secara kekuasaan maupun dampak politik.³⁹

Konteks pra dari pengiriman surat nabi Muhammad adalah tidak lepas dari konteks politik pasca perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah telah diakui sebagai peristiwa politik yang dilakukan Nabi Muhammad Saw. suatu proses komunikasi yang dilakukan pasca adanya proses komunikasi politik, sulit untuk ditampikan bahwa komunikasi tersebut bukan merupakan komunikasi politik. Sebagai contoh, komunikasi yang dilakukan oleh seorang kandidat pemimpin pasca deklarasi pencalonan pemimpin. Maka dapat dipastikan bahwa komunikasi yang dilakukan sesudahnya dalam rangka mendukung pencalonannya.

Tentu komunikasi pengiriman surat akan berbeda apabila surat tersebut dikirim tidak berkaitan dengan konteks perjanjian Hudaibiyah. Akan tetapi, perlu diingat kembali bahwa tanpa adanya konteks perjanjian Hudaibiyah, maka komunikasi dengan pihak eksternal selain umat Islam dan Quraisy tidak bisa dilakukan. Maka, selain terikat hubungan kausalitas dengan konteks perjanjian Hudaibiyah, analisis ini

juga dapat dikatakan mendapatkan temuan baru bahwa konteks pra komunikasi perlu menjadi bagian dari analisis komunikasi politik. Pada konteks pas, komunikasi yang dilakukan nabi adalah dengan raja-raja di semenanjung Arab. Perilaku nabi yang korespondensi dengan beberapa raja mendukung pernyataan bahwa nabi memiliki psikologis kesadaran atas perilaku yang dilakukannya.

2. Komunikator Komunikasi Politik

Komunikator dalam hal ini adalah Nabi Muhammad Saw. Nabi merupakan sosok pemimpin bagi umat muslim, sekaligus sosok pemimpin di Madinah. Hal tersebut diakui secara *de facto* melalui piagam Madinah. Bahkan, Piagam Madinah telah diakui sebagai undang-undang Islam pertama dalam sejarah.⁴⁰ Komunikasi yang dilakukan seorang pemimpin, tidak bisa dipisahkan dengan unsur politik dan kekuasaan. Sebab segala perilaku, khususnya bentuk komunikasinya akan diperhatikan oleh orang banyak khususnya orang yang dipimpin/ di bawah kepemimpinannya.⁴¹ Selain itu, komunikasi yang dilakukan oleh seorang pemimpin akan memberikan dampak pada pengaruh yang diembannya; apakah pengaruh tersebut akan tetap, menguat, atau melemah.

Pada aspek komunikator, hal yang perlu di analisis dan menjadikan komunikator dikatakan sebagai unsur dalam komunikasi politik adalah terkait dengan

³⁹ Carpenter, "Politics."

⁴⁰ Yetkin Yildirim, "The Medina Charter: A Historical Case of Conflict Resolution," *Islam and Christian-Muslim Relations* 20, no. 4 (Oktober 2009): 439, <https://doi.org/10.1080/09596410903194894>.

⁴¹ Anggit Rizkianto, "Kepemimpinan Karismatik H.O.S. Tjokroaminoto Di Sarekat Islam," *INTELEKSIA - Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah* 2, no. 1 (21 Agustus 2020): 55-80, <https://doi.org/10.55372/inteleksiajpid.v2i1.71>.

psikologi komunikasinya.⁴² Analisis psikologi komunikator dalam komunikasi politik dilakukan melalui unsur-unsur yang melekat pada komunikator, dan terutama melalui analisis perilakunya. Unsur-unsur yang melekat dengan komunikator politik selainnya adalah kemampuan, pengalaman, kewenangan, dan kepribadiannya.⁴³ Secara kemampuan, Muhammad dikatakan memiliki kemampuan. Komunikasi yang mempertimbangkan kedudukan struktural target komunikasi atau komunikannya, disusul karakteristik budaya, politik, dan media dapat dikatakan membentuk komunikasi politik di tingkat lain.⁴⁴

Pada saat pengiriman surat, ia berposisi bukan hanya sebagai Muhammad bin Abdullah, melainkan tak lepas dari kedudukannya sebagai nabi (pemimpin umat Islam), dan sebagai pemimpin di Madinah. Sebagai seorang pemimpin, sulit untuk mengatakan bahwa sosok nabi Muhammad dalam perilakunya khususnya ketika pengiriman surat ke raja Najasyi yang merupakan seorang pemimpin Habasyah, dan pemimpin umat Kristiani di Habasyah. Sedangkan pada aspek pengalaman, nabi sendiri memiliki *track record* sebagai pihak yang terlibat dalam berbagai peristiwa politik. Atas partisipasinya dalam berbagai peristiwa politik dan kedudukannya sebagai pemimpin akan menguatkan asumsi bahwa perilakunya tidak lepas dari pertimbangan politik. Selain Piagam Madinah, peristiwa politik selainnya adalah pada saat peletakan

Hajar Aswad, pembagian Ghanimah perang Hunain, pengiriman umat muslim pada saat hijrah ke Habasyah pertama kali, pada saat dakwah secara terbuka kepada masyarakat Arab, dan masih banyak lagi. Pengalaman inilah yang menunjukkan bahwa bukan sekali dua kali nabi melakukan perilaku politik untuk perkembangan dakwah Islam. Di sisi lain, pengalaman juga menunjukkan intensi dalam tindakan Nabi Muhammad Saw dalam berkomunikasi politik dapat diakui.

Psikologis Nabi Muhammad Saw diidentifikasi sebagai psikologi politik berkesadaran. Sebab mengirim surat kepada 7 orang raja, tidak mungkin tidak dalam pertimbangan kekuasaan baik dari umat muslim, penduduk Madinah, kedudukannya sebagai pemimpin, maupun kedudukan komunikannya. Hal ini juga dibuktikan dengan surat-surat yang dikirimkan kepada tiap raja memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Bila menelisik sudut pandang nabi Muhammad, nabi tidak hanya sekedar menyeru ajaran Islam; melainkan juga ingin agar Islam tidak hanya dikenal oleh masyarakat Mekkah dan Madinah.⁴⁵ Sebab agar suatu pihak, wilayah, atau kelompok masyarakat bisa diakui oleh pihak-pihak selainnya maka pihak tersebut perlu untuk memperkenalkan dan mengakui kedudukan pihak yang memperkenalkan dan memohon tersebut; sebagaimana konsep negara adalah salah satu unsurnya adalah pengakuan dari negara lain. Pengakuan yang dimaksud

⁴² Vivien Lowndes, David Marsh, dan Gerry Stoker, ed., *Theory and Methods in Political Science*, Fourth edition (London: Bloomsbury Academic, 2022).

⁴³ Nimmo, *Komunikasi politik komunikator, pesan, dan media pengantar*, 30.

⁴⁴ Blumler, "Core Theories of Political Communication," 426.

⁴⁵ Aziz, *BERPOLITIK UNTUK AGAMA Missi Islam, Kristen, dan Yahudi tentang Politik*, 115.

bukan berarti pengakuan secara administratif, melainkan pengakuan secara informal sebagaimana sistem politik di Arab sejak sebelum adanya Islam.⁴⁶ Hal tersebut dapat dikatakan sebagai upaya perwujudan kaum muslimin dapat bersekutu dengan siapa pun dari Perjanjian Hudaibiyah sekaligus upaya membentuk pengaruh dan kekuasaan Islam di Habasyah, sebab Habasyah adalah daerah yang penduduknya beragama Kristen namun penguasanya memiliki kebijaksanaan dalam berkuasa sehingga memiliki potensi dakwah dan penerimaan bagi umat muslim. Dengan dikenalkannya Islam, kemudian diterimanya Islam, maka secara tidak langsung Islam memiliki pengaruh dan kekuasaan di Habasyah.

Nabi mempertimbangkan komunikasi/ objek, pada aspek penghormatan objek politik/komunikannya, sebab penghormatan terhadap objek tersebut tidak lepas dari kedudukannya Najasyi sebagai pemimpin. Hal inilah yang juga membedakan antara komunikasi dengan penguasa dengan bukan penguasa. Bila dibaca sekilas, komunikasi nabi tersebut akan diidentifikasi sebagai komunikasi persuasif. Akan tetapi, konteks, dampak, subjek yang terlibat memiliki keterkaitan dengan politik maupun kekuasaan yang melekat pada kedua belah pihak. Terlebih dalam hal ini, Habasyah merupakan wilayah lain di luar Arab, sehingga tidak memiliki karakteristik yang sama dengan korespondensi sesama subjek di dalam negeri sebab adanya perbedaan wilayah dan kedudukan yang mempengaruhi komunikasi. Maka realitas komunikasi nabi ini tidak bisa diidentifikasi

sebagai komunikasi persuasif belaka, melainkan komunikasi politik dengan langkah-langkah persuasif.

Karakteristik dan budaya penduduk semenanjung Afrika (benua yang menaungi Arab dan Habasyah) pada masa itu adalah kesukuan yang cukup kuat.⁴⁷ Segala bentuk keputusan berdasar apa kata penguasa/ pemimpin. Hal ini berdampak pada cara berkomunikasi dan sistem politik yang terbentuk saat itu adalah eratnya kesukuan dan segala bentuk keputusan diamanahkan kepada pemimpin. Bila menelisik perspektif nabi Muhammad, apabila suratnya diterima maka kedudukannya sebagai pemimpin umat dan Madinah akan selamat. Sebaliknya apabila tidak diterima maka akan berpotensi untuk diserang, mengingat kedudukan Habasyah adalah kerajaan dengan bala tentara dan keyakinan terhadap nasrani kuat.

3. Komunikan dalam Komunikasi Politik

Sistem politik di Habasyah adalah kerajaan. Hal tersebut mempengaruhi bentuk komunikasi terutama komunikasi politik di kerajaan tersebut. Ditambah asumsi budaya Arab adalah bicara dengan pemimpin atau penguasa, maka sebuah pesan yang ada dalam proses komunikasi dengan penguasa akan mempengaruhi kebijakan dan keadaan di wilayah tersebut. Najasyi adalah gelar yang disematkan kepada seorang pemimpin Habasyah. Kerajaannya disebut juga sebagai Aksum. Sekarang wilayah tersebut dikenal sebagai Ethiopia. Selain Najasyi, sebutan untuk penguasanya ada-

⁴⁶ Dr Jawwad Ali, *Sejarah Arab Sebelum Islam 5: Politik, Hukum, dan Tata Pemerintahan* (Pustaka Alvabet, 2019).

⁴⁷ Ali.

lah Negus. Kerajaan tersebut sudah tercatat dalam sejarah hingga sekitar 900 masehi.

Menurut Abul Hasan An Nadawi dalam Al Uqaili,⁴⁸ sebelum Ashamah berkuasa, di Habasyah terjadi perebutan kekuasaan oleh para elit Habasyah. Bahkan diriwayatkan bahwa orang-orang Habasyah membunuh raja Abhar untuk kemudian mengangkat paman Ashamah menjadi raja. Ashamah sempat dibuang, hingga akhirnya didapatkan kembali dan dijadikan raja di Habasyah. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan di Habasyah sendiri terjadi perebutan kekuasaan dan berpengaruh ke sistem politik di Habasyah. Tiap-tiap pemimpin berpotensi untuk dijatuhkan bahkan dibunuh, mengingat menghilangkan nyawa demi kekuasaan lumrah terjadi di masyarakat semenanjung Arab pada masa itu. Sehingga, ketika mendapatkan stimulus untuk mengikuti atau setidaknya mengakui agama Islam dan dikaitkan dengan sejarah di Habasyah yang demikian, dapat diasumsikan bahwa Ashamah tidak mungkin tidak mempertimbangkan kedudukannya di Habasyah ketika mengakui Islam. Pengaruh dan kekuasaannya dipertaruhkan. Sekalipun Ashamah merupakan seorang manusia yang diriwayatkan memiliki sifat bijaksana dan mungkin tidak menjadikan kedudukannya sebagai raja adalah suatu hal yang wajib dijaga, hal tersebut tidak mengesampingkan fakta bahwa ia perlu untuk mengambil konsekuensi bila dihadapkan pada pengambilan keputusannya.

Bila menelisik pada kedudukan Najasyi yang tidak hanya seorang raja atas wilayah Habasyah melainkan juga pemimpin agama Nasrani di Habasyah, maka kedudukan pemerintahan dan kedudukan agama Nasrani adalah hal yang sama-sama dipertimbangkan dalam penerimaannya sebagaimana kepercayaan dan sistem yang sudah ada bahkan sebelum Islam di Arab.⁴⁹ Hal ini didasarkan pada, apabila Najasyi mengakui Islam sebagaimana dalam ajaran Nasrani bahwa akan ada nabi setelah Isa, maka yang ia lakukan adalah menyebarkan kepada umat Nasrani di Habasyah bahwa mereka hendaknya mengakui atau bahkan berislam. Sebaliknya, apabila tidak mengakui Islam dan kerasulan Nabi Muhammad Saw, hal tersebut mungkin tetap menjaga stabilitas Nasrani di Habasyah, tetapi kenyataan tersebut adalah penyangkalan terhadap kenyataan dan ajaran Nasrani. Sulit untuk tidak mengakui bahwa ada dilematis seperti ini dalam diri Ashamah.

Untuk mendukung argumentasi bahwa Najasyi Ashamah menerima dan mengakui Islam pasca komunikasi dilakukan adalah dengan dikirimkannya umat Islam di Habasyah ke Madinah. Maka dari itu, mungkin Islam diterima karena kebijaksanaannya Najasyi, tapi kita tidak bisa kesampingkan fakta bahwa situasi politik Habasyah juga tak luput dari pertimbangannya.

Karakteristik dan budaya penduduk Arab adalah apa kata penguasa. Apabila pemimpin sudah memutuskan sesuatu, maka orang-orang di bawah kepemimpinannya

⁴⁸ Al-Uqaili dan Ammar, *Surat-surat Nabi kepada para raja dan panglima perang*.

⁴⁹ Ali, *Sejarah Arab Sebelum Islam* 5, 118.

wajib untuk mengikuti sebab segala keputusan sudah dipercayakan kepada pemimpin⁵⁰. Hal ini tentu menjadi pertimbangan pada perspektif Najasyi Ashamah, mengingat ia diriwayatkan sebagai sosok yang bijaksana. Apabila ia mengakui Islam dan pengikutnya mengikutinya, maka setidaknya ada perpecahan antara orang-orang yang tetap pada Nasrani sekaligus orang-orang yang mengikuti untuk masuk atau setidaknya mengakui Islam. Belum lagi dampak bagi orang-orang muslim yang ia akui kedudukannya di Habasyah.

4. Dampak Komunikasi Politik

Untuk mengidentifikasi keberhasilan komunikasi, maka diperlukan *feedback* atau analisis terhadap dampak pasca komunikasi dilakukan. Pada komunikasi politik, dampak yang perlu dianalisis utamanya adalah dampak yang berkenaan dengan pengaruh dan kekuasaan pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi politik; mengingat dampak pasca dilakukannya komunikasi memungkinkan untuk dijumpai pada banyak hal. Analisis dampak politik juga ditujukan untuk membuktikan bahwa komunikasi yang dilakukan memang mengandung muatan politik, untuk selanjutnya bisa disebut sebagai komunikasi politik. Dampak dalam komunikasi setidaknya terdiri atas dua dampak utama yakni dampak positif dan negatif. Dampak komunikasi politik dikatakan positif apabila berdampak pada tetap dan atau menguatnya pengaruh dan

kekuasaan. Sebaliknya, dampak komunikasi politik dikatakan negatif apabila adanya pihak yang kekuasaannya menurun atau melemah.

Suatu komunikasi politik akan memberikan dampak terhadap jabatan, struktur, atau bahkan sistem politik.⁵¹ Akan tetapi, ada perbedaan dan kekhasan antara dampak komunikasi politik pada umumnya dengan dampak komunikasi politik dakwah. Pada dampak politik komunikasi politik dakwah, hasil akhir/ dampak yang dikehendaki bukan berfokus pada jabatan atau kedudukan semata, melainkan kepada terbentuknya kedudukan Islam bagi orang-orang yang memang menjadi target atau tujuan dalam berdakwah. Untuk mendapatkan dampak tersebut, komunikasi politik dakwah tidak mengesampingkan esensi atau nilai-nilai Islam itu sendiri; seperti komunikasi yang bil hikmah, fiqih untuk menjalin hubungan baik dengan orang lain terutama hubungan komunikator dengan negaranya.⁵²

Apabila menelisik pada komunikasi yang dilakukan nabi Muhammad terhadap raja Najasyi, dampak politik pertama adalah pengaruh Islam menguat di Habasyah. Tidak hanya umat Islam yang diakui kedudukannya dengan Habasyah, melainkan agama Islam itu sendiri menjadi menguat dan terjalinnya hubungan diplomatik antara nabi Muhammad sebagai pemimpin agama Islam dan pemimpin Madinah dengan Najasyi. Hal ini merupakan

⁵⁰ Ali, 122.

⁵¹ H. Tolga Bolukbasi dan Deniz Yıldırım, "Institutions in the Politics of Policy Change: Who Can Play, How They Play in Multiple Streams," *Journal of Public Policy* 42, no. 3 (September 2022): 509–28, <https://doi.org/10.1017/S0143814X2100026X>.

⁵² Imam Taufik Alkhotob Alkhotob, "FIQIH MINORITAS MUSLIM DALAM BERINTERAKSI KEPADA NEGARANYA," *Jurnal Da'wah: Risalah Merintis, Da'wah Melanjutkan* 4, no. 01 (30 Juli 2021): 89–111, <https://doi.org/10.38214/jurnaldawahstidnatsir.v4i01.97>.

dampak politik bagi nabi Muhammad sebagai komunikator politik, pengirim surat, dan pemimpin bagi Madinah maupun umat muslim.

Beberapa sirah Nabawiyah meriwayatkan bahwa Najasyi bahkan masuk Islam. Hal tersebut diragukan oleh kalangan orientalis sebab tidak adanya sumber atau data yang valid yang menyatakan Islamnya Najasyi. Stuart Munro-Hay sendiri menyatakan bahwa ada yang menyatakan Islamnya Najasyi tanpa menjelaskan lebih detail mengenai sumber pernyataan tersebut.⁵³ Maka, selain dampak politik bagi Islam adalah kedudukan Islam menguat, dampak politik bagi Najasyi adalah pada kedudukan dan pengaruh yang dimilikinya. Terlepas dari Najasyi benar berislam atau tidak, *bare minimum* yang disepakati oleh para ilmuwan adalah Islam diterima dengan baik sesudahnya, dan Najasyi memulangkan beberapa umat muslim di Habasyah ke Madinah. Ada yang meriwayatkan bahwa tujuan dari memulangkan umat muslim ini adalah demi keamanan dari umat muslim dan agama Islam itu sendiri di Habasyah.⁵⁴ Ibnu Hisyam meriwayatkan bahwa eksistensi Ashamah dipertaruhkan pada masa ini setelah dia berislam, lantas ia meninggal dalam keadaan berislam dan Nabi Muhammad Saw memberikan penghormatan kepadanya melalui salat Ghaib.⁵⁵

Peristiwa ini tak ayal melemahkan pengaruh dan kekuatan Quraisy. Sebab ketika nabi Muhammad melakukan diplomasi kepada raja-raja di semenanjung

Arab dan kabilah-kabilah di sekeliling Mekkah dan Madinah, Quraisy tidak mengalami perubahan signifikan atas kelompok atau kabilah yang menjalin relasi dengannya. Dampak politik bagi Quraisy adalah melemahnya pengaruh yang dimilikinya bersamaan dengan menguatnya pengaruh yang dimiliki umat Islam. Hal ini karena beriringan dengan kejadian ini, posisi Islam menguat dan diakui oleh banyak pihak. Pada akhirnya Islam diakui sebagai agama dan umat Islam boleh untuk melakukan ibadah di Mekkah sebagaimana agama selainnya. Sebagaimana komunikasi yang dilakukan Quraisy dengan Habasyah pada saat peristiwa hijrah pertama yang ternyata gagal, maka kedudukan Quraisy pada perspektif Habasyah menjadi tidak memiliki pengaruh sama sekali, padahal Quraisy adalah suku yang disegani sebelumnya termasuk bagi para elit dan pemimpin Habasyah.

Korelasi Antara Dakwah dengan Komunikasi Politik

Pada pengiriman surat Nabi Muhammad Saw kepada Raja Najasyi, tujuan utamanya adalah untuk berdakwah sebagaimana teksnya bila dipahami secara eksplisit. Akan tetapi, dalam penelitian ini ditemukan adanya unsur lain yang melekat pada proses komunikasi tersebut.

Dalam dimensi psikologi politik, ditemukan adanya berkehendak atas dampak politik dan berkesadaran atas dampak politik. Berkehendak berarti Rasul memang menginginkan dampak politik dari tujuan

⁵³ Stuart C. Munro-Hay, *Aksum: An African Civilisation of Late Antiquity* (Edinburgh University Press, 1991).

⁵⁴ Al-Uqaili dan Ammar, *Surat-surat Nabi kepada para raja dan panglima perang*.

⁵⁵ Ibnu Ishaq dan H. Samson Rahman, *Sirah Nabawiyah*.

komunikasinya. Sedangkan berkesadaran berarti tidak menginginkan tujuan politik dari perilakunya atau setidaknya memang memiliki intensi untuk melakukan komunikasi politik namun sadar bahwa perilaku komunikasi tersebut membawa dampak politik.⁵⁶

Nabi sedari awal tujuan komunikasinya adalah untuk dakwah, namun sulit untuk menyatakan bahwa nabi tidak berkesadaran atas komunikasi yang beliau lakukan. Hal ini karena proses komunikasi yang dilakukan adalah, pertama, proses komunikasi antara kedua penguasa. Kedua, terikat dengan posisi Habasyah sebagai oposisi antara Persia dan Romawi, maupun antara umat Islam dengan Quraisy. Artinya, situasi politik pada saat itu tentulah mempengaruhi segala proses komunikasi, hubungan diplomatik, maupun unsur kekuasaan pada Habasyah dan umat Islam di Madinah.

Bila pada aspek dakwah ditemukan adanya salah satu metode dakwah yakni dakwah struktural disusul perintah dalam berdakwah adalah berdasarkan esensi dan ajaran Islam, hal yang sama juga ditemukan dalam etika politik. Etika politik yang idealnya dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang berkaitan dengan politik dan kekuasaan adalah melalui cara-cara yang sportif, dan tidak melanggar hukum universal dalam penerapannya.⁵⁷ Hal ini mendukung teori bahwasanya ajaran Islam adalah ajaran yang

menjawab dan berdasar relevansi zaman, serta bisa diterapkan secara universal.

Secara konteks komunikasi, pengiriman surat Nabi Muhammad Saw masih terikat dengan peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Namun tidak hanya terikat pada konteks perjanjian Hudaibiyah, melainkan juga terikat konteks pra Hudaibiyah serta pengiriman surat. Jauh sebelum terjadinya perjanjian Hudaibiyah, hubungan antara masyarakat Mekkah dengan Habasyah pernah terjalin pada masa kakek Nabi Muhammad Saw, Abdul Muthalib.⁵⁸

Pada masa itu, raja dari Habasyah adalah Abrahah atau Abraham. Ia dan pasukannya hendak menaklukkan Mekkah, bahkan berkomunikasi secara langsung dengan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib merupakan pemimpin/elite dalam masyarakat Quraisy.⁵⁹ Maka, bila pada bertahun-tahun kemudian terjadinya proses komunikasi antara umat Islam (dalam hal ini antara Nabi Muhammad Saw. sebagai cucu pemimpin Quraisy) dengan pemimpin wilayah yang hendak menaklukkan Ka'bah setelah melalui proses komunikasi politik antara kedua pimpinan tersebut, dapat dikatakan bahwa komunikasi yang terjadi pada masa Nabi Muhammad Saw. bukan hanya sekadar komunikasi dakwah, melainkan komunikasi antara kedua belah pihak yang pernah saling memperebutkan kekuasaan secara politik.

Pertemuan antara Abdul Muthalib dengan Abrahah adalah pertemuan antara pemimpin dengan pemimpin, yang berarti

⁵⁶ Cottam dkk., *Introduction to Political Psychology*.

⁵⁷ Franz Magnis-Suseno, *Etika politik: prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern*, Cet. 2 (Jakarta: Gramedia, 1988).

⁵⁸ Ibnu Ishaq dan H. Samson Rahman, *Sirah Nabawiyah*.

⁵⁹ Ibnu Ishaq dan H. Samson Rahman.

tidak bisa melepaskan unsur politik, dan pengaruh kedua belah pihak. Meskipun proses komunikasi tersebut tidak berjalan baik dan Abraha kemudian menyerang Makkah, tetap tidak bisa mengesampingkan fakta bahwa proses komunikasi politik sudah tercipta saat itu.

Kejadian selanjutnya yang memiliki relevansi dengan pengiriman surat kepada raja Najasyi adalah pada saat Nabi Muhammad Saw mengirimkan delegasi muslim kepada Najasyi sebelum Hijrah ke Madinah. Sebelum Nabi Muhammad Saw. mengirimkan beberapa muslimin ke Habasyah, raja Habasyah pada saat itu sudah dikenal sebagai raja yang baik dan bijaksana.⁶⁰ Akan tetapi, kekhawatiran umat muslim pada peristiwa tahun Gajah (penyerangan Abraham), penduduk Habasyah adalah kaum Nasrani, ditambah relasi yang dimiliki kafir Quraisy dengan Habasyah bila dianalisis cukup memberikan kekhawatiran bagi mereka.⁶¹ Akan tetapi dengan komunikasi yang dilakukan Ja'far selaku perwakilan muslim, hal tersebut dapat diatasi dan membentuk hubungan diplomasi pertama antara umat Islam dengan Habasyah.

Hal tersebut yang kemudian memberikan pengaruh pada masa pengiriman nabi Muhammad. Raja Habasyah pada masa nabi memang bukan lagi Abraha, akan tetapi bila dianalisis lebih dalam, pertimbangan Nabi Muhammad Saw. untuk mengirim surat kepada Najasyi bukan hanya karena itu.

Sebagai seorang dai, pemimpin umat muslim maupun pemimpin di Madinah, sulit untuk menyatakan bahwasanya nabi tidak

mempertimbangkan eksistensi, kekuasaan, ataupun keadaan dari umatnya. Hal ini karena pengiriman surat dapat diasumsikan mengancam keberadaan dan kedudukan dari umat muslim, sebab apabila komunikasi tersebut gagal dilakukan maka akan berpotensi untuk membuat umat muslim diabaikan atau bahkan diserang, mengingat Habasyah itu sendiri adalah kerajaan besar yang memiliki pertahanan sedangkan umat muslim di Madinah dapat dikatakan belum kuat pada saat itu.

Nabi Muhammad Saw terindikasi tidak hanya sekedar persuasif atau mempengaruhi Najasyi, melainkan adanya suatu hal yang membuat seorang Raja Najasyi yang notabene merupakan seorang raja, seorang pemimpin agama Nasrani di negaranya, seorang kepala pemerintahan, menjadi menerima dan bahkan menjalin hubungan baik dengan umat muslim. Katakanlah peristiwa tersebut terjadi karena kebijaksanaan, kedermawanan dari raja Najasyi. Akan tetapi, untuk bisa memunculkan kebijaksanaan tersebut tentu melalui sebuah proses dan membutuhkan "instrumen" yang membuatnya menerima pesan Nabi Muhammad Saw. Sebab, apabila Nabi Muhammad Saw hanya mempersuasi, hal tersebut dikatakan belum mampu membuat raja Najasyi tergerak atau setidaknya sepakat, mengingat segala keputusan yang beliau ambil akan berpengaruh terhadap kedudukannya sebagai seorang raja, seorang pemimpin agama, dan seorang kepala pemerintahan. Hal tersebut, dalam penelitian kali ini disebut sebagai sumber

⁶⁰ Haikal, *Rasulullah dan Al-Khulafa'ur Rasyidun*.

⁶¹ Ibnu Ishaq dan H. Samson Rahman, *Sirah Nabawiyah*.

kuasa. Sumber kuasa merupakan pengaruh atau hal-hal yang membuat objek atau komunikan terpengaruh atas subjek/ komunikator. Ragam dari sumber kuasa ini bisa berupa kredibilitas, kemampuan, karakter, kekuasaan, dan sebagainya.

Kesimpulan

Pertama, Nabi Muhammad Saw. sebagai pemimpin umat Islam dan pemimpin di Madinah tidak hanya menggunakan pertimbangan dakwah dalam korespondensinya dengan Raja Najasyi, melainkan juga menggunakan pertimbangan politik. Hal tersebut yang kemudian disebut sebagai komunikasi politik dakwah. Kedua, yang membedakan antara komunikasi politik dakwah dengan komunikasi politik pada umumnya adalah pada komunikasi politik dakwah, tujuan

yang ingin dicapai tidaklah bersifat materi sebagaimana komunikasi politik pada umumnya melainkan untuk tujuan dakwah semata. Ketiga, komunikasi politik dakwah berlandaskan konsepsi ajaran Islam yang *rahmatan lil alamin*, selaras dengan etika politik yang idealnya dilakukan dengan cara sportif. Keempat, dalam komunikasi politik ada faktor sumber kuasa yang bisa digunakan komunikator dalam mencapai tujuan komunikasi politiknya.

Sumber kuasa merupakan pengaruh atau hal-hal yang membuat objek atau komunikan terpengaruh atas subjek/ komunikator. Ragam dari sumber kuasa ini bisa berupa kredibilitas, kemampuan, karakter, kekuasaan, dan sebagainya. Sebagaimana Islam yang melarang perilaku yang zalim terhadap diri maupun orang lain, etika politik juga memiliki esensi yang sama.

Bibliografi

- Ali, Dr Jawwad. *Sejarah Arab Sebelum Islam 5: Politik, Hukum, dan Tata Pemerintahan*. Pustaka Alvabet, 2019.
- Alkhotob, Imam Taufik Alkhotob. "Fiqih Minoritas Muslim Dalam Berinteraksi Kepada Negaranya." *Jurnal Da'wah: Risalah Merintis, Da'wah Melanjutkan* 4, no. 01 (30 Juli 2021): 89–111. <https://doi.org/10.38214/jurnaldawahstidnatsir.v4i01.97>.
- Al-Uqaili, Uhairid Muhammad, dan Wafi Marzuqi Ammar. *Surat-surat Nabi kepada para raja dan panglima perang*. Surabaya: Pustaka Yassir, 2011.
- Amin, H Misbahuddin. "Dakwah Kultural Menurut Perspektif Pendidikan Islam." *Atta'dib Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (17 November 2020): 71–84. <https://doi.org/10.30863/attadib.v1i2.1023>.
- Aziz, Dr. A. Gaffar. *Berpolitik Untuk Agama Missi Islam, Kristen, dan Yahudi tentang Politik*. Diterjemahkan oleh Ilyas Siraj, SH.M.ag. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Aziz, H. Moh Ali. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Azizi, Muhammad Hildan. "Kesantunan Berbahasa Dakwah Struktural pada Debat Politik Para Nabi dalam Al-Qur'an." *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 9, no. 1 (8 Februari 2023): 41–55. <https://doi.org/10.54471/dakwatuna.v9i1.2207>.
- Blumler, Jay G. "Core Theories of Political Communication: Foundational and Freshly Minted." *Communication Theory* 25, no. 4 (1 November 2015): 426–38. <https://doi.org/10.1111/comt.12077>.

- Bolukbasi, H. Tolga, dan Deniz Yıldırım. "Institutions in the Politics of Policy Change: Who Can Play, How They Play in Multiple Streams." *Journal of Public Policy* 42, no. 3 (September 2022): 509–28. <https://doi.org/10.1017/S0143814X2100026X>.
- Carpenter, William Seal. "Politics: Who Gets What, When, How. By Harold D. Lasswell. (New York: Whittlesey House. 1936. Pp. Ix, 264.)." *American Political Science Review* 30, no. 6 (Desember 1936): 1174–76. <https://doi.org/10.2307/1948299>.
- Cottam, Martha L., Elena Mastors, Thomas Preston, dan Beth Dietz. *Introduction to Political Psychology*. 4 ed. New York: Routledge, 2022. <https://doi.org/10.4324/9780429244643>.
- Dudung Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011.
- Fawaid, H.Jazilul. *Bahasa Politik Al-Qur'an Konsep dan Aktualisasinya dalam sejarah*. Disunting oleh Uinmuha Khusnan. Depok: Azza Media, 2012.
- Haikal, Husayn. *Rasulullah dan Al-Khulafa'ur Rasyidun*. Jakarta: Litera Antar Nusa, 2008.
- Harianto, Yudi Asmara. "Prospek Dakwah Bil Qalam di Era New Media." *Bil Hikmah: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 2, no. 1 (30 Januari 2024): 151–68. <https://doi.org/10.55372/bilhikmahjkpi.v2i1.27>.
- Hatta, Fatiha Ardi, dan Dhifa Widya Nur Arifah. "Pesan Dakwah dalam Film Animasi Hafiz & Hafizah Pendekatan Struktur Narasi Todorov." *Bil Hikmah: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 2, no. 1 (30 Januari 2024): 127–50. <https://doi.org/10.55372/bilhikmahjkpi.v2i1.26>.
- Ibnu Ishaq dan H. Samson Rahman. *Sirah Nabawiyah: sejarah lengkap kehidupan Rasulullah S.A.W*. Jakarta: Akbarmedia, 2013.
- Ilaihi, Wahyu, dan Andriyani Kamsyah. *Komunikasi dakwah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Lowndes, Vivien, David Marsh, dan Gerry Stoker, ed. *Theory and Methods in Political Science*. Fourth edition. London: Bloomsbury Academic, 2022.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika politik: prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern*. Cet. 2. Jakarta: Gramedia, 1988.
- Munro-Hay, Stuart C. *Aksum: An African Civilisation of Late Antiquity*. Edinburgh University Press, 1991.
- Nimmo, Dan. *Komunikasi politik komunikator, pesan, dan media pengantar: Jalaluddin Rakhmat*. Disunting oleh Jalaluddin Rakhmat. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya, 1999.
- Nurul Insani, Agusti Alfi. "Dakwah Politik Nabi Muhammad Saw Melalui Surat Kepada Raja Heraklius, Kisra Abrawaiz, Muqauqis, Dan Najasyi." *Islamic Communication Journal* 4, no. 1 (7 Juli 2019): 60. <https://doi.org/10.21580/icj.2019.4.1.3595>.
- Prianto, Agung Teguh. "Komunikasi Dakwah Berbasis Multikultural dalam Perspektif Al-Qur'an." *Bil Hikmah: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 1, no. 1 (22 Juli 2023): 193–210. <https://doi.org/10.55372/bilhikmahjkpi.v1i1.15>.
- "Qur'an Kemenag." Diakses 23 Juni 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=59&to=59>.
- Rizkianto, Anggit. "Kepemimpinan Karismatik H.O.S. Tjokroaminoto Di Sarekat Islam." *IN-TELEKSIA - Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah* 2, no. 1 (21 Agustus 2020): 55–80. <https://doi.org/10.55372/inteleksiajpid.v2i1.71>.
- Surbakti, Ramlan A. *Memahami ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.
- Yildirim, Yetkin. "The Medina Charter: A Historical Case of Conflict Resolution." *Islam and Christian-Muslim Relations* 20, no. 4 (Oktober 2009): 439–50. <https://doi.org/10.1080/09596410903194894>.

